



PT. BPR OLYMPINDO PRIMADANA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PERIODE 31 DESEMBER 2025



KANTOR PUSAT

Jalan Jatiwaringin Raya No 170
Jatiwaringin Pondok Gede
Bekasi 17411

KANTOR CABANG TANGERANG

Ruko Ruko Sutera Niaga I No. 67
Jl. Raya Serpong
Tangerang 15325

PENJELASAN UMUM

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan.

PT BPR Perekonomian Rakyat Olympindo Primadana berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagai landasan utama dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan serta memastikan keberlangsungan usaha yang sehat, transparan, dan kompetitif. Penerapan prinsip dasar GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dijalankan secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif hingga seluruh karyawan.

Untuk mengukur efektivitas implementasi GCG, BPR Olympindo Primadana secara berkala melakukan penilaian mandiri (self-assessment) berdasarkan laporan internal dan dokumen pendukung yang relevan, dengan ruang lingkup penilaian yang mencakup struktur tata kelola, pelaksanaan tugas, transparansi pelaporan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko.

Seluruh proses penerapan dan evaluasi GCG ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat kinerja perusahaan, menciptakan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	:	PT BPR Olympindo Primadana
Posisi Laporan	:	31 Desember 2026
Alamat	:	Jl. Jatiwaringin Raya No. 170 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi 17411
Nomor Telepon	:	0218463858
Modal Inti BPR	:	(Rp. 3.237.956.761)
Total Aset BPR	:	Rp. 56.384.995.820
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Peringkat Komposit	:	Peringkat 2 (cukup baik)
Faktor Positif (Kekuatan)	:	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan dan pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola.
Faktor Negatif (Kelemahan)	:	Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut ke depannya akan cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
Kesimpulan Akhir	:	Dalam menerapkan Tata Kelola, BPR memiliki peringkat komposit 2 yang berarti cukup memadai. Manajemen BPR menilai bahwa tata kelola sudah saatnya dilaksanakan di lingkungan bank mengingat BPR salah satu industri perbankan dan lembaga intermediasi yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR menganut prinsip tata kelola sebagai berikut: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dan kesetaraan. Dengan disusunnya SOP GCG BPR, tata kelola bank akan berjalan baik, Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif. Fungsi kepatuhan, audit intern, audit ekstern akan berjalan sesuai dengan ketentuan GCG.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BPR Olympindo Primadana dipimpin oleh dua orang anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur yang menjabat sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Direktur Utama berdomisili di provinsi yang sama dengan lokasi kantor cabang Tangerang BPR, bekerja penuh waktu, serta tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, maupun kepemilikan saham dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris. Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan berdomisili di provinsi yang sama dengan lokasi kantor BPR, bekerja penuh waktu, serta tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, maupun kepemilikan saham dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sesuai hasil RUPS PT. BPR Olympindo Primadana tanggal 26 Januari 2024 & AKTA No 12 tanggal 26 Januari 2024 telah ditetapkan 1 (satu) orang Direktur membawahkan fungsi kepatuhan, dan telah memperoleh persetujuan OJK.

Keanggotaan Direksi berjumlah 2 (orang) orang dengan komposisi berikut :

Nama	Jabatan
Lany	Direktur Utama
Ana Martiany	Direktur Membawahkan Fungsi Kepatuhan

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen, dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanggung jawab, serta berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam setiap kegiatan usaha, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyusun laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengurusan perusahaan.

Direksi telah menunjuk Satu Pejabat Eksekutif guna mendukung pelaksanaan fungsi operasional BPR. Selain itu, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan peran pengawasan dari Dewan Komisaris. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat, meskipun dokumentasinya masih perlu ditingkatkan secara administratif.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas, Direksi secara aktif menindaklanjuti setiap temuan audit internal maupun eksternal, serta rekomendasi dari Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya. Direksi juga menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai ketentuan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BPR Olympindo Primadana berjumlah dua orang, Anggota Dewan Komisaris berdomisili di provinsi yang berbeda dengan kantor pusat BPR, serta telah memenuhi ketentuan terkait independensi. Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan atau kepemilikan dengan pihak-pihak terkait, tetapi memiliki hubungan keluarga dengan para pemegang saham. Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga atau kepemilikan dengan pihak-pihak terkait. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang baik

Sesuai hasil RUPS PT. BPR Olympindo Primadana tanggal 26 Januari 2024 & AKTA No 12 tanggal 26 Januari 2024 telah ditetapkan 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris. Sehingga susunan pengurus Bank dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Jimmy Bintoro	Komisaris Utama
Simon Hasan Gunadi	Komisaris

b. Tugas dan Tanggung Jawab

serta menjalankan tugas dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian tanpa mengambil alih kewenangan operasional.

- 1) Komisaris Utama melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen dan profesional untuk memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan perannya, Komisaris Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan, serta mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara keseluruhan.

Komisaris Utama juga bertugas memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi guna mendukung pengelolaan perusahaan yang efektif dan berkelanjutan, memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit internal serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memastikan tindak lanjut tersebut berjalan dengan tepat waktu dan efektif.

Selain itu, Komisaris Utama bertanggung jawab atas penyusunan risalah rapat Dewan Komisaris sebagai dokumentasi resmi seluruh keputusan, evaluasi, dan arahan strategis yang diberikan sepanjang tahun buku berjalan.

- 2) Komisaris

Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen dan profesional untuk memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan perannya, Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Komisaris juga bertugas memberikan nasihat kepada Direksi dalam rangka menjaga kesinambungan dan pertumbuhan usaha perusahaan, memastikan

bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas tindak lanjut tersebut.

Selain itu, Komisaris bertanggung jawab untuk menyusun risalah rapat Dewan Komisaris sebagai bentuk dokumentasi resmi atas seluruh keputusan, arahan, serta pengawasan yang telah dilakukan selama periode berjalan.

3. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite (Jika Ada)

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	Tidak ada
2	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	Tidak ada
3	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite:	
Meningat modal inti BPR belum mencapai Rp50 miliar, maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya.	

4. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1				
2				
3				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:				
Meningat modal inti BPR belum mencapai Rp50 miliar, maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya. Dengan demikian, informasi mengenai Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite, serta Program Kerja Komite dan Realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.				

5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan pada	% Saham
a.	0%
Penjelasan Lebih lanjut:	
Direksi tidak memiliki saham di BPR Olympindo Primadana	

b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan pada	% Saham
a. Jimmy Bintoro	7.50%
b.	0%
Penjelasan Lebih lanjut:	
Komisaris Utama memiliki saham di BPR Olympindo Primadana sedangkan komisaris tidak	

c. Kepemilikan Saham Pemegang Saham Pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan pada	% Saham
a. Ang Andi Bintoro	67.50%
b. Linda karnadi	10.00%
c. Jimmy Bintoro	7.50%
d. Meilyana Bintoro	7.50%
e. Silviana Bintoro	7.50%
Penjelasan Lebih lanjut:	
Pemegang saham memiliki saham di BPR Olympindo Primadana	

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan pada	% Saham
a.	0%
Penjelasan Lebih lanjut:	
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain	

b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan pada	% Saham
a.	0%
b.	0%
Penjelasan Lebih lanjut:	
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain	

7. **Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR**

a. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Lany	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ana martiany	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.				

b. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Jimmy Bintoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Simon Hasan Gunadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.				

8. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Dan Pemegang Saham Pada BPR

a. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Lany	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Ana Martiany	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.				

b. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Jimmy Bintoro	Tidak ada	Tidak ada	Ada
2	Simon Hasan Gunadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Komisaris Utama memiliki hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham BPR dan anggota komisaris yang lain tidak memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.				

9. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

a. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
gaji	2	Rp54.334.000	2	Rp51.817.000
tunjangan	0	Rp0	0	Rp0
tantiem	0	Rp0	0	Rp0

kompensasi berbasis saham	0	Rp0	0	Rp0
Remunerasi lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total Remunerasi	2	Rp54.334.000		Rp51.817.000
Penjelasan Lebih lanjut :				
Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham dan bentuk remunerasi lainnya.				

- b. Paket/Kebijakan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Perumahan	0	Rp0	0	Rp0
Transportasi	2	Rp36.369.470	2	Rp38.886.804
Asuransi Kesehatan	0	Rp0	0	Rp0
Fasilitas Lain-Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total Fasilitas Lain	0	Rp0	0	Rp0
Total Remunerasi		Rp0		Rp0
Penjelasan Lebih lanjut :				
Fasilitas lainnya dalam bentuk natura/non-natura yang penghasilan tidak tetap lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.				

10. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Variabel	Perbandingan/Rasio (a)/(b) : 1
a.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.2
b.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.2

c.	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.02
d.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.37
e.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.71
Penjelasan Lebih Lanjut:		
Sudah sesuai dengan SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR		

11. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-01-09	5	Review Collection, kendala yang dihadapi dalam penagihan nasabah KKO, KTA dan Sertifikat serta strategi apa yang akan digunakan dalam pengurangan kredit bermasalah.
2	2025-02-06	4	Pembahasan mengenai penyaluran kredit KTA Multigina dan kredit Jaminan Sertifikat
3	2025-10-08	7	Pembahasan Penagihan nasabah, strategi penagihan Deskcoll dan pembagian tugas penagihan untuk deskoll
4	2025-10-23	6	Evaluasi Kredit Kelompok

12. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Jimmy Bintoro	4	0	100.00
2	Simon hasan Gunadi	4	0	100.00
Penjelasan Lebih lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris hadir di kantor BPR secara berkala, yakni satu kali setiap minggu, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.				

13. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) adalah sebagai berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

14. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih lanjut :		
Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya		

penyelesaian diantaranya:

Jumlah permasalahan hukum perdata yang dalam proses selesai sebanyak 1 kasus.

15. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Penjelasan Lebih lanjut :

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan.

Pada tahun 2025 tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT BPR Olympindo Primadana.

16. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
0	01 (Kegiatan Sosial)	0	0	0
0	01 (Kegiatan Sosial)	0	0	0

Penjelasan Lebih lanjut :

Selama Tahun 2025, BPR Tidak Melakukan Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik (Nihil).



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
OLYMPINDO PRIMADANA**

Kantor Pusat :
Jl. Jatiwaringin Raya No. 170, Pondok Gede Bekasi 17411
Telp. (021) 8463858 (Hunting) Fax. (021) 8463856

Kantor Cabang :
Ruko Sutra Niaga I No.67 Serpong, Tangerang 15325
Tel. (021) 53124869, 53124402 Fax. (021) 5398711

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
ATAS LAPORAN TAHUNAN
PT BPR OLYMPINDO PRIMADANA PERIODE TAHUN 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : LANY
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Jatiwaringin Raya no. 170 Jaiwaringin Pondok Gede Bekasi
2. **Nama** : Ana Martiany
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Jatiwaringin Raya no. 170 Jaiwaringin Pondok Gede Bekasi

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Tahunan PT BPR Olympindo Primadana periode tahun 2025.
2. Laporan Tahunan PT BPR Olympindo Primadana periode tahun 2025 telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (SAK EP) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Laporan Tahunan PT BPR Olympindo Primadana periode tahun 2025 memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan tata kelola perusahaan.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Olympindo Primadana, serta menjamin bahwa transaksi keuangan telah dicatat dengan benar dan sesuai peraturan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 April 2026

PT BPR BPR OLYMPINDO PRIMADANA



(Lany)
Direktur Utama

Ana Martiany
Direktur

Kemudahan, Kepercayaan Dan Kepuasan